



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**KECAMATAN MANTUP**

Jl. Ayam Alas No. 45 Mantup Kodepos 62283  
Telp.0322-4672299, Fax. 0322-4672299 e-mail mantup@lamongankab.go.id  
Laman : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 23 September 2025

Nomor : 700.1.2.1/391/413.316/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 Bendel  
Hal : Tindak Lanjut LHE Manajemen Risiko  
Kecamatan Mantup Semester I Tahun  
2025

Kepada :  
Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

di -

LAMONGAN

Menindaklanjuti Surat Saudara tanggal 21 Juli 2025 Nomor: 700.1.2.1/111.13/LHP/413.201/2025 perihal Laporan Hasil Reviu Manajemen Risiko pada Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Semester I Tahun 2025, maka dengan ini kami kirimkan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Kecamatan Mantup Semester I Tahun 2025 berserta lampiran data pendukungnya sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas perhatian kerjasamanya, kami ucapan terima kasih.

**CAMAT MANTUP**  
  
**SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19851010 200602 1 001

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO**  
**KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**  
**SEMESTER I TAHUN 2025**

No	Nomor dan Tanggal LHE	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Jawab Status/Progres Penyelesaian
1	700.1.2.1/111.13/L HP/413.201/2025  Tanggal: 21 Juli 2025	<p>1. Menambahkan identifikasi risiko operasional (risiko kegiatan) pada tahapan perencanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang memuat potensi risiko <i>fraud</i> (penyimpangan) dan risiko kemitraan.</p> <p>2. Melampirkan dokumen pendukung berupa dokumentasi foto dan notulen rapat atau FGD mitigasi risiko di Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Tribulanan pada Sub Bab “Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko” atau Form 9.</p>	<p>– Akan dilakukan identifikasi risiko operasional pada tahapan perencanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang memuat potensi risiko <i>fraud</i> (penyimpangan) dan risiko kemitraan.</p> <p>– Akan Melampirkan dokumen pendukung berupa dokumentasi foto dan notulen rapat atau FGD mitigasi risiko di Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Tribulanan pada Sub Bab</p>	<p>Laporan Penilaian Risiko</p>	<p>Tribulan II s/d Tribulan IV Tahun 2025</p>	Sekretariat	<p>– Telah dilakukan identifikasi risiko operasional pada tahapan perencanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang memuat potensi risiko <i>fraud</i> (penyimpangan) dan risiko kemitraan.</p> <p>– Telah melampirkan dokumen pendukung berupa dokumentasi foto dan notulen rapat atau FGD mitigasi risiko di Laporan</p>

		<p>3. Melakukan perbaikan pengisian waktu pelaksanaan/penerapan RTP secara tepat dan spesifik sesuai dengan realisasi kegiatannya.</p> <p>4. Melakukan perbaikan pengisian waktu rencana dan realisasi pemantauan pelaksanaan RTP secara tepat dan spesifik serta mencatat keterjadian risikonya.</p> <p>5. Menyusun Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2025 dan dikirimkan kepada unit kepatuhan serta diunggah pada aplikasi Simario..</p>	<p>“Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko” atau Form 9.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan dilakukan perbaikan pengisian waktu pelaksanaan/penerapan RTP secara tepat dan spesifik sesuai dengan realisasi kegiatannya.</li> <li>- Akan dilakukan perbaikan pengisian waktu rencana dan realisasi pemantauan pelaksanaan RTP secara tepat dan spesifik serta mencatat keterjadian risikonya.</li> <li>- Akan menyusun Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2025 dan</li> </ul>				Berkala Pengelolaan Risiko Tribulanan pada Sub Bab “Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko” atau Form 9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilakukan perbaikan pengisian RTP sesuai ketentuan dan saran yang diberikan</li> <li>- Telah dilakukan penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2025 dan melakukan publikasi pada aplikasi Simario.</li> </ul>
--	--	--	---	--	--	--	---	--

		melakukan publikasi pada aplikasi Simario.					
--	--	--	--	--	--	--	--

Lamongan, 23 September 2025



Penambahan risiko operasional pada tahap perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang memuat trsisiko fraud dan kemitraan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi/fasilitasi pelayanan publik kecamatan	Pelaksanaan	Keterlambatan pemrosesan dokumen kependudukan	ROO. 25.99.50.01	Seksi Pelayanan Publik	1. Jumlah petugas pelayanan yang kurang	Internal dan Eksternal	C	1. Dokumen kependukunan tidak dapat selesai tepat waktu	Masyarakat, Kecamatan, Pemerintah Kab. Lamongan
							2. Jaringan yang sering trobel			2. Kepuasan masyarakat menurun	
							3. Sarpras yang kurang memadai				
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang koordinasi pemberdayaan desa	Pelaksanaan	Banyaknya usulan kegiatan yang tidak tercover	ROO. 25.99.50.02	Seksi PPM	Aparatur desa kurang memahami kondisi dan kebutuhan desa	Eksternal	UC	Prioritas pembangunan dan pemberdayaan desa tidak tepat sasaran	Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan
3	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	Pelaksanaan	Kegiatan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait belum optimal	ROO. 25.99.50.03	Seksi Trantibum	1. Penjadwalan kegiatan belum dilakukan dengan matang 2. Koordinasi belum dilakukan secara rutin dan terarah	Internal dan Eksternal		Kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku kurang	Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum	Pelaksanaan	Adanya konflik sosial yang tidak tertangani dengan baik atau terlambat tertangani	ROO. 25.99.50.04	Seksi Trantibum	Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait	Internal dan Eksternal	UC	Kurang terjaminnya keamanan dan kenyamanan masyarakat	Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan
5	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Pelaksanaan	Keterlambatan dalam pelaporan adminstrasi dan keuangan pemerintahan desa	ROO. 25.99.50.05	Seksi Pemerintahan	1. Tingkat disiplin aparatur desa masih rendah 2. SDM aparatur desa yang belum menguasai administrasi pemerintahan desa dan TIK	Eksternal	UC	Penyelenggaraan pemerintahan desa kurang maksimal	Masyarakat dan Pemerintah Kab. Lamongan
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Perencanaan	Ketidaksesuaian antara perencanaan dengan penganggaran	ROO. 25.99.50.06	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya koordinasi dan perubahan kebijakan yang mendadak			Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan optimal	Kecamatan dan ASN dilingkup Kecamatan
			Pelaporan	Risiko Fraud Manipulasi data capaian kinerja	ROO. 25.99.50.07	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Tidak adanya verifikasi independen, budaya formalitas dalam evaluasi	Internal	C	Laporan kinerja tidak mencerminkan realitas, keputusan salah	Kecamatan dan ASN dilingkup Kecamatan
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Pertanggungjawaban	Risiko Fraud Pemeriksaan terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai	ROO. 25.99.50.08	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurang tertibnya administrasi pelaksanaan kegiatan pada aspek keuangan	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat	Kecamatan dan ASN dilingkup Kecamatan
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan Barang yang diperoleh melalui pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan	ROO. 25.99.50.9	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kurangnya klarifikasi dan komunikasi yang jelas terkait spesifikasi barang.	Internal	C	Penurunan kualitas pelayanan atau proyek yang menggunakan barang tersebut. Potensi kerugian finansial akibat pengadaan ulang atau perbaikan barang.	Kecamatan dan ASN dilingkup Kecamatan
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Pelaksanaan	Sarana dan prasarana penunjang kantor kurang terpelihara	ROO. 25.99.50.10	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Rendahnya kepedulian pegawai untuk memelihara sarana dan prasarana penunjang kantor	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang	Kecamatan dan ASN dilingkup Kecamatan



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN MANTUP**

Jl. Ayam Alas No. 45 Mantup Kodepos 62283  
Telp.0322-4672299, Fax. 0322-4672299 e-mail mantup@lamongankab.go.id  
Laman : www.lamongankab.go.id

---

**NOTULEN RAPAT**

Nama Rapat	:	Mitigasi Risiko dan RTP Kecamatan Mantup
Hari/tanggal	:	Senin, 17 Maret 2025
Pukul	:	13.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Kecamatan Mantup
Pimpinan Rapat	:	Suwanto Sastrodiharjo, S.STP., M.M. (Camat Mantup)
Notulis	:	Wiwik Widyawati (Staf Perencanaan dan Keuangan)
Peserta Rapat	:	Kasi, Kasubag dan Staf Kecamatan Mantup

**Materi yang disampaikan :**

1. Pembukaan rapat dimulai pada pukul 13.30 WIB dan dipimpin Bpk. Camat Mantup, yang memberikan sambutan dan penjelasan mengenai pentingnya penguatan manajemen risiko untuk mendukung akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Pembahasan rapat terdiri dari pemaparan daftar risiko dari masing-masing seksi, dilanjutkan dengan identifikasi, analisis dan mitigasi risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja Kecamatan Mantup serta penyusunan rencana tindak pengendalian yang dibutuhkan.

**Kesimpulan :**

1. Disepakati sejumlah risiko strategis dan risiko operasional sebagaimana terlampir.
2. Agar segera menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) beserta jadwal monitoring risiko setiap triwulan.
3. Menyusun laporan penialian dan pengendalian risiko sebagai bagian dari dokumen SAKIP Kecamatan Mantup

Mantup, 17 Maret 2025  
Notulis

ttd.

**WIWIK WIDYAWATI, S.E.**  
**Penata Muda Tk. I**  
**NIP. 19951218 202012 2 018**

## DAFTAR RISIKO PRIORITAS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025

### 1. RISIKO STRATEGIS ORGANISASI

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
				Risiko							
1	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	Nilai IKM turun	RSO. 25.99.50.01	Camat	Pelayanan yang kurang optimal disebabkan SDM dan Sarpras yang kurang memadai	Internal dan Eksternal	C	1. Keterlambatan pelayanan	Masyarakat, Kecamatan, Pemerintah Kab. Lamongan	
									2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan		
2	Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Tidak ada peningkatan status desa	RSO. 25.99.50.02	Camat	Pembangunan desa belum optimal	Internal dan Eksternal	UC	Peningkatan status desa terhambat	Masyarakat, Kecamatan, Pemerintah Kab. Lamongan	
3	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP turun	RSO. 25.99.50.03	Camat	1. Kualitas implementasi SAKIP masih kurang 2. Kendala dalam penyusunan dokumen SAKIP	Internal	C	Nilai SAKIP turun	Kecamatan, Pemerintah Kab. Lamongan	
4	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	Kendala dalam peningkatan pemberdayaan desa	RSO. 25.99.50.04							
						Hambatan fisik wilayah desa, hambatan sosial budaya, dan hambatan ekonomi	Eksternal	UC	Pembangunan desa terhambat	Masyarakat, Kecamatan, Pemerintah Kab. Lamongan	

## 2. RISIKO OPERASIONAL ORGANISASI

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi/fasilitasi pelayanan publik kecamatan	Pelaksanaan	Keterlambatan pemrosesan dokumen kependudukan	ROO. 25.99.50.01	Seksi Pelayanan Publik	1. Jumlah petugas pelayanan yang kurang	Internal dan Eksternal	C	1. Dokumen kependukukan tidak dapat selesai tepat waktu	Masyarakat, Kecamatan, Pemerintah Kab. Lamongan
							2. Jaringan yang sering trobel			2. Kepuasan masyarakat menurun	
							3. Sarpras yang kurang memadai				
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang koordinasi pemberdayaan desa	Pelaksanaan	Banyaknya usulan kegiatan yang tidak tercover	ROO. 25.99.50.02	Seksi PPM	Aparatur desa kurang memahami kondisi dan kebutuhan desa	Eksternal	UC	Prioritas pembangunan dan pemberdayaan desa tidak tepat sasaran	Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan
3	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	Pelaksanaan	Kegiatan koodinasi dengan lembaga/instansi terkait belum optimal	ROO. 25.99.50.03	Seksi Trantibum	1. Penjadwalan kegiatan belum dilakukan dengan matang 2. Koordinasi belum dilakukan secara rutin dan terarah	Internal dan Eksternal		Kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku kurang	Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum	Pelaksanaan	Adanya konflik sosial yang tidak tertangani dengan baik atau terlambat tertangani	ROO. 25.99.50.04	Seksi Trantibum	Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait	Internal dan Eksternal	UC	Kurang terjaminnya keamanan dan kenyamanan masyarakat	Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan
5	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Pelaksanaan	Keterlambatan dalam pelaporan adminstrasi dan keuangan pemerintahan desa	ROO. 25.99.50.05	Seksi Pemerintahan	1. Tingkat disiplin aparatur desa masih rendah 2. SDM aparatur desa yang belum menguasai administrasi pemerintahan desa dan TIK	Eksternal	UC	Penyelenggaraan pemerintahan desa kurang maksimal	Masyarakat dan Pemerintah Kab. Lamongan
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu		Ketidaksesuaian antara perencanaan dengan penganggaran	ROO. 25.99.50.06		Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya koordinasi dan perubahan kebijakan yang mendadak	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan optimal
			Pelaporan	<b>Risiko Fraud</b> Manipulasi data capaian kinerja	ROO. 25.99.50.07	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Tidak adanya verifikasi independen, budaya formalitas dalam evaluasi	Internal	C	Laporan kinerja tidak mencerminkan realitas, keputusan salah	Kecamatan dan ASN dilingkup Kecamatan
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Pertanggungjawaban	<b>Risiko Fraud</b> Pemeriksaan terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai	ROO. 25.99.50.08	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurang tertibnya administrasi pelaksanaan kegiatan pada aspek keuangan	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat	Kecamatan dan ASN dilingkup Kecamatan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	Pelaksanaan	<b>Risiko Kemitraan</b> Barang yang diperoleh melalui pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan	ROO. 25.99.50.9	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kurangnya klarifikasi dan komunikasi yang jelas terkait spesifikasi barang.	Internal	C	Penurunan kualitas pelayanan atau proyek yang menggunakan barang tersebut. Potensi kerugian finansial akibat pengadaan ulang atau perbaikan barang.	Kecamatan dan ASN dilingkup Kecamatan
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Pelaksanaan	Sarana dan prasarana penunjang kantor kurang terpelihara	ROO. 25.99.50.10	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Rendahnya kepedulian pegawai untuk memelihara sarana dan prasarana penunjang kantor	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang	Kecamatan dan ASN dilingkup Kecamatan

## DOKUMENTASI KEGIATAN



## Perbaikan RTP Risiko Kecamatan Mantup

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Risiko Strategis OPD</b>							
<b>Kecamatan Mantup:</b>							
1	Nilai IKM turun / tidak mencapai target	RSO.25.99.50.01	1. SOP Pelayanan 2. Monitoring dan evaluasi secara berkala	1. Jaringan internet yang sering trobel 2. ketersediaan blanko 3. sarpras penunjang yang kurang memadai	1. Koordinasi dengan dinas terkait 2. Inovasi pelayanan publik 3. Pengadaan sarpras penunjang	Kasi Pelayanan Publik	Januari-Desember
2	Tidak ada peningkatan status desa/terjadi penurunan status desa	RSO.25.99.50.02	Peningkatan peran pendamping desa	Kurangnya kapasitas aparatur desa	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	Kasi PPM	Januari-Desember
3	Nilai SAKIP Turun/tidak mencapai target	RSO.25.99.50.03	Penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pelaksanaan Kinerja Kecamatan Mantup serta Melakukan efisiensi dan efektivitas kinerja sesuai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kurangnya Kompetensi SDM Aparatur	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	Sekcam	Januari-Desember
4	Kendala dalam peningkatan pemberdayaan desa	RSO.25.99.50.04	Pendampingan dan Monitoring secara berkala	Kurangnya kapasitas aparatur desa	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	Kasi PPM dan Pemerintahan	Januari-Desember

Risiko Operasional OPD						
Kecamatan Mantup:						
1 Keterlambatan pemrosesan dokumen kependudukan	ROO. 25.99.50.01	Penerapan SOP Pelayanan	1. Jumlah Personil yang kurang 2. Jaringan internet tidak stabil, 3. Sarpras yang kurang memadai	1.Penambahan jumlah personil 2. Memanggil teknisi dan berkoordinasi dengan dinas terkait 3. Pengadaan sarpras	Kasi Pelayanan Publik	Januari-Desember
2 Banyaknya usulan kegiatan yang tidak tercover	ROO. 25.99.50.02	melaksanakan evaluasi usulan yang masuk	Tidak terintegrasinya data usulan	Membuat masterplan pembangunan desa sesuai ketentuan juknis	Seksi PPM	Januari - April
3 Kegiatan koodinasi dengan lembaga/instansi terait belum optimal	ROO. 25.99.50.03	membuat jadwal kegiatan forum lintas sektor	tidak ada mekanisme pengawasan atau evaluasi terhadap kepatuhan jadwal	Mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh muspika	Seksi Trantibum	Januari-Desember
4 Adanya konflik sosial yang tidak tertangani dengan baik atau terlambat tertangani	ROO. 25.99.50.04	melaksanakan kegiatan pencegahan melalui rapat koordinasi dan deklarasi damai	tidak ada mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen damai	Mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh muspika	Seksi Trantibum	April-Agustus
5 Keterlambatan dalam pelaporan adminstrasi dan keuangan pemerintahan desa	ROO. 25.99.50.05	Konferensi dan monev	tidak ada sanksi atau konsekuensi atas keterlambatan	Sosialisasi dan bimtek kepada aparatur desa	Seksi Pemerintahan	Januari-Desember
6 Ketidaksesuaian antara perencanaan dengan penganggaran	ROO. 25.99.50.06	Terdapat evaluasi internal dan pengawasan melalui reviu oleh Inspektorat	- evaluasi lebih berfokus pada capaian - pengawasan dilakukan pasca penyusunan, sehingga tidak mencegah ketidaksesuaian sejak awal	Meningkatkan koordinasi antara tim perencanaan dan keuangan, menyusun rencana untuk perubahan kebijakan atau anggaran, dan melakukan perubahan perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.	Sekretariat	Januari-Desember
7 Manipulasi data capaian kinerja	ROO. 25.99.50.07	Penetapan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan	Sebagian indikator belum spesifik dan rawan dimanipulasi interpretasinya	Melakukan internal review indikator agar lebih terukur dan berbasis data kuantitatif	Sekretariat	Maret, Juni, September, dan Desember
8 Pemeriksaan terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai	ROO. 25.99.50.08	Mekanisme LPJ (Laporan Pertangungjawaban) dilakukan setiap akhir periode	Penyusunan LPJ masih bersifat formalitas dan terkadang tidak diuji kesesuaian realisasinya	Mewajibkan lampiran bukti fisik/output kegiatan untuk setiap realisasi anggaran	Sekretariat	Januari-Desember
9 Barang yang diperoleh melalui pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan	ROO. 25.99.50.9	Menetapkan prosedur pengadaan yang jelas dan terdokumentasi, termasuk persyaratan spesifikasi yang harus dipenuhi oleh penyedia barang atau jasa.	-	Melakukan klarifikasi yang jelas terkait spesifikasi barang sejak awal proses pengadaan. Melibatkan pihak yang berkompeten dalam menentukan dan memeriksa spesifikasi barang.	Sekretariat	September - November
10 Sarana dan prasarana penunjang kantor kurang terpelihara	ROO. 25.99.50.10	Inventarisasi dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana kantor secara berkala serta peningkatan pengawasan pemegang barang milik negara.	Tidak semua pegawai mempunyai kesadaran untuk memelihara sarana dan prasarana kantor dengan baik.	Optimalisasi penyusunan rencana anggaran kas dan jadwal rencana kegiatan.	Sekretariat	Januari-Desember

## Bukti Upload Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2025 di Aplikasi Simario

The screenshot shows the SIMARIO application interface. At the top, there is a blue header bar with the INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN logo, a search bar, and user profile icons for 'Pandu' and 'KM'. On the left, a sidebar menu lists: Dashboard, RPJMD, Renstra, Renja, Dinas Terkait, and Pelaporan. The main content area is titled 'Pelaporan' and 'Periode 2025'. It contains two sections: '1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko' and '2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko'. The second section is expanded, showing '2.1 Pelaporan Unit Pemilik Risiko' and a note: 'Ket : Semua OPD dan Pemda ; Pelaporan Dilaksanakan Setiap Tribulan'. Below this is a table listing two reports:

No	Nama Laporan	Entitas	Hapus	Download
1	Laporan Pengelolaan Risiko TB I	Kecamatan Mantup	<button>Hapus</button>	<button>Download</button>
2	Laporan Pengelolaan Risiko TB II	Kecamatan Mantup	<button>Hapus</button>	<button>Download</button>

A green 'Tambah' button is located at the bottom of the report list.